



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi.

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang biayanya melebihi Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu biaya yang berlaku dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 55

| TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM | |
|------------------------------|---|
| KA BAG HUKUM |  |
| KA SUB BAG PER UUAN |  |

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|---|---|
| 1 | SEKDA  |  |
| 2 | ASS. SEKDA |  |
| 3 | KA BAG |  |
| 4 | KA SUB BAG | |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TENTANG
STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

| NO | JENIS KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PERJALANAN DINAS | 1. Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | Biaya Perjalanan Dinas : |
| | | a. Perjalanan Dinas dengan Menginap | | 1. Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari biaya transport PP, uang harian, penginapan, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah serta uang representasi. |
| | | 1). Luar Jawa | | |
| | | - Bupati | 1,000,000 | 2. Biaya Perjalanan Dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya Angkutan Jenazah diberikan secara riil. |
| | | - Wk. Bupati | 900,000 | |
| | | - Ketua DPRD | 1,100,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 1,075,000 | 3. Uang Harian dipergunakan untuk kebutuhan makan, uang saku, dan uang representasi diberikan secara Lumpsum sesuai tanggal melaksanakan Perjalanan Dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 1,000,000 | |
| | | - Eselon III | 750,000 | |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 650,000 | |
| | | - Golongan III | 600,000 | 4. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum. |
| | | - Golongan II | 500,000 | |
| | | - Golongan I | 375,000 | |
| | | | | |
| | | | | 5. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan. |
| | | 2) DKI, Jabar, Banten dan Jatim | 1,000,000 | |
| | | - Bupati | 900,000 | |
| | | - Wk. Bupati | 1,100,000 | 6. Perjalanan dinas menginap di Jawa Tengah dan DIY dengan jarak lebih dari 250 km PP. dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan ditempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya |
| | | - Ketua DPRD | 1,075,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 1,000,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 750,000 | |
| | | - Eselon III | 650,000 | 7. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan. |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 600,000 | |
| | | - Golongan III | 500,000 | 8. Jika kegiatan dibutuhkan keberangkatan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, biaya perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut : |
| | | - Golongan II | 375,000 | a. penghitungan biaya perjalanan dinas H- 1 dan H + 1 berdasarkan ketentuan dalam kolom 3 angka 1 huruf a point 1) dan 2). |
| | | - Golongan I | | b. penghitungan biaya perjalanan dinas selama akomodasi ditanggung panitia penyelenggara berdasarkan ketentuan dalam kolom 3 angka 1 huruf b. |
| | | 3). Perjalanan ke Semarang dan Kota-kota lain dlm Wilayah Provinsi Jateng, DIY (kecuali Kota Magelang) | | |
| | | - Bupati | 1,000,000 | 9. Jika perjalanan dinas harus menyvetor biaya akomodasi kepada panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dihitung sebagai berikut : |
| | | - Wk. Bupati | 750,000 | a. biaya akomodasi yang disetor sesuai dengan biaya ditentukan oleh panitia, dibuktikan dengan surat/ undangan dan bukti penerimaan/ setor. |
| | | - Ketua DPRD | 600,000 | b. biaya perjalanan dinas yang diterimakan dihitung berdasarkan ketentuan dalam kolom 3 angka 1 huruf b. |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 575,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 550,000 | |
| | | - Eselon III (Pimpinan Unit) | 500,000 | |
| | | - Eselon III | 400,000 | |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 350,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------|---|-----------|--|
| | - Golongan III | | 325,000 | 10. Uang Transport Pergi - Pulang dari tempat tugas ke Kota Tujuan dibayar : |
| | - Golongan II | | 300,000 | a. Kendaraan Roda 4 (Mobil) Dinas/Pribadi untuk Dinas sebesar Rp. 1.200,-/km. |
| | - Golongan I | | 275,000 | b. Kendaraan Roda 4 (Mobil) Dinas/Pribadi untuk Dinas tujuan diluar Provinsi Jateng dan DIY minimal berpenumpang 3 (tiga) orang termasuk Sopir. |
| | | | | c. Sepeda Motor sebesar Rp. 600,-/km |
| | | | | d. Kendaraan Umum tujuan didalam Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp. 600,-/km |
| | | | | e. Kendaraan Umum tujuan diluar Provinsi Jateng dan DIY dibayarkan sesuai harga tiket (dibuktikan dengan tiket). |
| | | | 1,000,000 | f. Pesawat Udara dan Kereta Api dibayarkan sesuai harga tiket (dibuktikan dengan tiket). |
| | | | 750,000 | |
| | | | 900,000 | 11. Penggunaan Sarana Angkutan Perjalanan |
| | | | 850,000 | a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf dapat menggunakan Pesawat Terbang. |
| | | | 650,000 | b. Penggunaan Pesawat Terbang dengan memperhatikan efisiensi waktu dan biaya, |
| | | | 550,000 | c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan darat (mobil dinas, kereta api, kendaraan umum) yang membutuhkan keberangkatan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, biaya perjalanan dinas dihitung berdasarkan tanggal kegiatan |
| | | | 400,000 | {Jumlah hari kegiatan ditempat ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya}. |
| | | | 255,000 | |
| | | | | d. Perjalanan dinas dengan pesawat dan kapal laut dihitung berdasarkan tanggal tiket pergi pulang. |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 750,000 | e. Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 oleh Eselon IV dan Staf dengan ijin tertulis dari Kepala SKPD/ Sekretaris DPRD/ Kepala Bagian Setda. |
| | | | 850,000 | 12. a. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas baik Perjalanan Dinas Luar Negeri maupun Perjalanan Dinas Dalam Negeri agar dilakukan secara selektif, frekwensi dan jumlah harinya dibatasi. |
| | | | 800,000 | |
| | | | 650,000 | |
| | | | 550,000 | |
| | | | 500,000 | b. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja dan Studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dgn upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yg sedang dirumuskan Pemerintah Daerah dan dilengkapi dgn laporan hasil kunjungan kerja dan Study Banding dimaksud. |
| | | | 400,000 | |
| | | | 255,000 | |
| | | | | |
| | | | 1,000,000 | 13. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Bupati Magelang/Surat Edaran yang mengatur. |
| | | | 750,000 | |
| | | | 525,000 | |
| | | | 500,000 | 14. Perjalanan Dinas kepada Masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan, disamakan dgn : |
| | | | 475,000 | a. Golongan IV |
| | | | 450,000 | - Tokoh Agama |
| | | | 350,000 | - Ketua Organisasi |
| | | | 300,000 | b. Gol. III |
| | | | 275,000 | - Ketua Kelompok Tani, |
| | | | 250,000 | - Tokoh Pemuda, Koperasi, dll yang disamakan. |
| | | | 225,000 | c. Golongan II |
| | | | | - Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | - Petani, |
| | | | | - Atlet, dll yang disamakan |
| | | | | |
| | | | 1,000,000 | 15. Perjalanan dinas yang dilaksanakan Pihak II diluar perangkat daerah yang dibiayai APBD dapat dibiayai berdasarkan indeks yang berlaku pada Instansi Pihak II. |
| | | | 750,000 | |
| | | | 600,000 | |
| | | | 575,000 | 16. Dalam hal Perjalanan Dinas kepada Pihak II diluar perangkat daerah yang dibiayai APBD dapat dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan dgn mendasarkan Surat Perintah Tugas dr Pimpinan Instansi yg bersangkutan disesuaikan dgn penggolongan Perjalanan Dinas. |
| | | | 550,000 | |
| | | | 500,000 | |
| | | | 400,000 | |
| | | | 350,000 | |
| | | | 325,000 | 17. Bagi CPNS diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai Golongan dan bagi tenaga Kontrak disamakan dengan Tingkat Ijazah yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK). |
| | | | 300,000 | |
| | | | 275,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|-----------|---|
| | | 2) Perjalanan dalam daerah Kabupaten/Kota Magelang | | |
| | | a. Jarak 10 - 20 km PP. | | 18. Biaya Perjalanan Dinas diberikan apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas minimal 10 km PP dari tempat kedudukan, kecuali Kecamatan dan Kelurahan. |
| | | - Ketua DPRD | 80,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 80,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 70,000 | |
| | | - Eselon III | 65,000 | 19. Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh dgn 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) SPPD. |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 60,000 | |
| | | - Golongan III | 50,000 | 20. Perjalanan Dinas pada prinsipnya berlaku untuk hari dan tujuan tertentu yang disebutkan dengan jelas pada kolom SPPD. |
| | | - Golongan II | 40,000 | |
| | | - Golongan I | 30,000 | |
| | | b. Jarak diatas 20 km PP. | | 21. Pejabat / Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, kepada keluarganya diberikan biaya pemetaan yg dibayarkan secara Lumpsum dan biaya angkutan jenazah yg dibayarkan secara riil (terlampir) dan dianggarkan pd SKPD Pengelola Kepegawaian (BKD), untuk Ketua / Wakil dan Anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD. |
| | | - Ketua DPRD | 130,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 125,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 120,000 | 22. Pejabat/ Pegawai/ Keluarga yang ditugaskan menjemput/ mengantar Jenazah diberikan Perjalanan Dinas maksimal 4 (empat) orang selama-lamanya 3 (tiga) hari. |
| | | - Eselon III | 110,000 | |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 100,000 | |
| | | - Golongan III | 80,000 | 23. Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dalam lampiran huruf D. |
| | | - Golongan II | 70,000 | |
| | | - Golongan I | 50,000 | |
| | | 2. Satuan Biaya Penginapan | | |
| | | a. Penginapan di Luar Jawa | | |
| | | - Bupati | 1,000,000 | |
| | | - Wk. Bupati | 1,000,000 | |
| | | - Ketua DPRD | 1,100,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 1,100,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 1,100,000 | |
| | | - Eselon III | 1,000,000 | |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 900,000 | |
| | | - Golongan III | 800,000 | |
| | | - Golongan II | 700,000 | |
| | | - Golongan I | 700,000 | |
| | | b. Penginapan di DKI, Jabar, Banten dan Jatim | | |
| | | - Bupati | 1,000,000 | |
| | | - Wk. Bupati | 1,000,000 | |
| | | - Ketua DPRD | 1,000,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 1,000,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 1,000,000 | |
| | | - Eselon III | 800,000 | |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 700,000 | |
| | | - Golongan III | 650,000 | |
| | | - Golongan II | 500,000 | |
| | | - Golongan I | 500,000 | |
| | | c. Penginapan di Jawa Tengah dan DIY | | |
| | | - Bupati | 1,000,000 | |
| | | - Wk. Bupati | 750,000 | |
| | | - Ketua DPRD | 600,000 | |
| | | - Wk. Ketua DPRD | 600,000 | |
| | | - Anggota DPRD dan Eselon II | 575,000 | |
| | | - Eselon III | 550,000 | |
| | | - Golongan IV/Ess. IV | 500,000 | |
| | | - Golongan III | 450,000 | |
| | | - Golongan II | 400,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - Golongan I | 350,000 | |
| | | 3. Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri | up. | 24. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku. |
| | | | | |
| | | | | |

I. SARANA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

| TRANSPORTASI DAN AKOMODASI | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| No. | PEJABAT | <div>Pesawat Udara<div>Kereta Api /Kendaraan Umum</div></div> |
| 1 | Bupati | Bisnis |
| 2 | Wakil Bupati | Bisnis |
| 3 | Ketua / Wakil Ketua DPRD | Ekonomi |
| 4 | Anggota DPRD dan Eselon II | Ekonomi |
| 5 | Golongan IV | Ekonomi |
| 6 | Golongan III | Ekonomi |
| 7 | PNS Golongan II | Ekonomi |
| 8 | PNS Golongan I | Ekonomi |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |
| | Eksekutif | Eksekutif |

J. BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN

| TINGKAT PEGAWAI | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--------------------|--|
| No | URAIAN | Bupati / Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wk. Ketua / Anggota DPRD & Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III | Pejabat Eselon IV |
| 1 | Biaya Pemetian | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Biaya Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. | | |
| | | Keterangan : menggunakan alat angkutan Darat, Air dan Udara | | |
| | | | | Pejabat Fungsional Umum / khusus 2.000.000 |

K. UANG REPRESENTASI

| UANG REPRESENTASI ORANG / HARI | | |
|--------------------------------|--|---|
| No. | PEJABAT | <div>Luar Jawa,DKI,Jabar,Jatim dan Banten</div> <div>Semarang dan Kota lain di wil. Provinsi Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)</div> |
| 1. | Bupati / Wakil Bupati | 500.000 |
| 2 | Wakil Bupati | 250.000 |
| 2 | Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II | 100.000 |

JARAK ANTAR KOTA PULAU JAWA DAN BALI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-------------|--------|------------|
| MAGELANG | 248 km | Ciamis | 270 km | Cirebon | 493 km | Bekasi | 485 km | Cikampek | 522 km | Jakarta | 530 km | Bogor | 592 km | Serang | 623 km | Merak |
| MAGELANG | 265 km | Tasikmalaya | 312 km | Kuningan | 366 km | Bandung | 396 km | Subang | 437 km | Kerawang | 463 km | Sukabumi | 482 km | Garut | | |
| MAGELANG | 75 km | Semarang | 102 km | Demak | 122 km | Grobogan | 125 km | Kudus | 150 km | Pati | 145 km | Jepara | 186 km | Rembang | 222 km | Blora |
| MAGELANG | 104 km | Kendal | 168 km | Batang | 175 km | Pekalongan | 210 km | Pemalang | 240 km | Tegal | 253 km | Brebes | 49 km | Salatiga | 64 km | Boyolali |
| MAGELANG | 43 km | Purworejo | 87 km | Kebumen | 176 km | Cilacap | 24 km | Temanggung | 62 km | Wonosobo | 81 km | Banjarnegara | 116 km | Purbalingga | 146 km | Punwokerto |
| MAGELANG | 33 km | Sleman | 41 km | Yogyakarta | 73 km | Klaten | 108 km | Solo | 136 km | Sragen | 122 km | Karang Anyar | 120 km | Sukoharjo | 140 km | Wonogiri |
| MAGELANG | 221 km | Madiun | 260 km | Ponorogo | 277 km | Tulungagung | 350 km | Blitar | 385 km | Malang | 477 km | Lumajang | 565 km | Jember | 576 km | Bondowoso |
| MAGELANG | 245 km | Nganjuk | 286 km | Tuban | 294 km | Kediri | 310 km | Jombang | 311 km | Mojokerto | 394 km | Surabaya | 420 km | Gresik | 668 km | Bangkalan |
| MAGELANG | 388 km | Sidoarjo | 404 km | Pasuruhan | 442 km | Probolinggo | 660 km | Banyuwangi | 728 km | Ketapang | | | | | | |
| BANGKALAN | 90 km | Pamekasan | 61 km | Sampang | 154 km | Sumenep | | | | | | | | | | |
| GILIMANUK | 108 km | Tabanan | 134 km | Denpasar | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- 1 Jarak KOTA MUNGKID s/d KOTA MAGELANG 17 Km
- 2 Untuk Wilayah Madura (Jarak s/d Gresik + Penyeberangan)
- 3 Untuk Wilayah Bali (Jarak s/d Ketapang + Penyeberangan)

JARAK ANTAR KOTA KECAMATAN



BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

| | |
|------------------------------|--|
| TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM | |
| KA BAG HUKUM | |
| KA SUB BAG PER UJIAN | |

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|------------|-------|
| 1 | SEKDA | PT |
| 2 | ASS. SEKDA | |
| 3 | KA BAG | |
| 4 | KA SUB BAG | |